

# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

# 2020-2024



**DIREKTORAT  
PENGUATAN PENERAPAN STANDAR  
DAN PENILAIAN KESESUAIAN**



## Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Renstra PPSPK) Tahun 2020-2024 memuat turunan dari visi dan misi BSN, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh Direktorat PPSPK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra PPSPK Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024.

Renstra PPSPK Tahun 2020-2024 diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari pihak terkait dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan pada indikator kinerja di lingkungan Direktorat PPSPK.

Harapan kami semoga Renstra Direktorat PPSPK Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat PPSPK kepada publik di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Jakarta, Maret 2021  
Direktur Penguatan Penerapan  
Standar dan Penilaian Kesesuaian



Heru Suseno

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>IIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I_PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.2 Capaian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2015-2019.....	5
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	32
<b>BAB II_VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024.....</b>	<b>35</b>
2.1 Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi.....	36
2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat.....	38
2.3 Nilai-Nilai Direktorat.....	39
<b>BAB III_KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT.....</b>	<b>41</b>
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat PPSPK.....	42
3.2 Rincian Output.....	42
<b>BAB IV_TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Target Kinerja.....	48
4.2 Kerangka Pendanaan.....	48
<b>BAB V_PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
<b><u>LAMPIRAN</u></b>	
LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	
LAMPIRAN 2 : <u>M</u> atriks Kerangka Regulasi	

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1. 1</b>	<b>Personel ASN Direktorat PPSPK.....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1. 2</b>	<b>Tujuan Direktorat PPSPK Tahun 2015-2019 mengacu pada Tujuan Unit Kerja sebelumnya.....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1. 3</b>	<b>Gambaran ringkas pelaksanaan BMN tahun 2015 – 2019.....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 1. 4</b>	<b>Jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi KAN... </b>	<b>16</b>
<b>Tabel 1. 5</b>	<b>Gambaran Layanan KLT Tahun 2017-2019.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 1. 6</b>	<b>LPK yang di fasilitasi BSN Tahun 2015-2019.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 1. 7</b>	<b>Laboratorium Penguji yang terdaftar ASEAN.....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 1. 8</b>	<b>Lembaga Sertifikasi Produk yang terdaftar di ASEAN.....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 2. 1</b>	<b>Tujuan dan Indikator Tujuan Kedeputian PSPK 2020-2024.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 2. 2</b>	<b>Tujuan dan Sasaran PPSPK.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3. 1</b>	<b>Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. 2</b>	<b>Rencana Output.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4. 1</b>	<b>Target Kinerja Direktorat Tahun 2020-2024.....</b>	<b>48</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1. 1	Bagan Struktur Organisasi Direktorat PPSPK .....	4
Gambar 1. 2	Pertumbuhan <i>Follower</i> Media Sosial BSN.....	7
Gambar 1. 3	Kegiatan Bulan Mutu Nasional di daerah.....	10
Gambar 1. 4	Transformasi SNI Award.....	11
Gambar 1. 5	Perkembangan Peserta SNI Award Periode 2015-2019.....	12
Gambar 1. 6	Umpan Balik Peserta SNI Award.....	12
Gambar 1. 7	Penganugerahan SNI Award.....	13
Gambar 1. 8	Dokumentasi dukungan penerapan SNI ISO 37001 oleh KSP dan KPK.....	14
Gambar 1. 9	Sosialisasi Desa Tangguh Bencana.....	14
Gambar 1. 10	Pertumbuhan jumlah organisasi penerap SNI dari tahun 2016- 2019.....	17
Gambar 1. 11	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam penerapan SNI dalam tahun 2015-2019.....	18
Gambar 1. 12	Data komulatif UMKM yang dbina dalam penerapan SNI tahun 2015- 2019.....	19
Gambar 1. 13	Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM.....	19
Gambar 1. 14	Akumulasi Jumlah UMKM yang dibina dan memperoleh SNI tahun 2015-2019 .....	20
Gambar 1. 15	Sebaran Pembinaan Penerapan SNI kepada UMKM di 28 Propinsi..	20
Gambar 1. 16	Jumlah Organisasi yang Dibina dalam Penerapan SNI Tahun 2015- 2019 .....	21
Gambar 1. 17	Pembimbingan Organisasi berdasar Jenis Organisasi .....	22
Gambar 1. 18	Pembimbingan Organisasi berdasar Jenis SNI .....	22
Gambar 1. 19	Sebaran Pembinaan Organisasi yang dibina dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020 .....	23
Gambar 1. 20	Peresmian KLT di Palembang, Makassar, Pekanbaru, Surabaya dan Bekasi/Bandung .....	26
Gambar 1. 21	Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Barat.....	27
Gambar 1. 22	Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Tengah .....	28
Gambar 1. 23	Hasil Pemetaan LPK di Wilayah Indonesia Bagian Timur .....	28
Gambar 1. 24	Jumlah LPK yang difasilitasi BSN Tahun 2015-2019.....	28
Gambar 1. 25	Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPK.....	29

<b>Gambar 1. 26</b>	<b>Sebaran Wilayah LPK yang di fasilitasi BSN Tahun 2015-2019.....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 1. 27</b>	<b>Partisipasi pada sidang JSC-EEE ke-27.....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 2. 1</b>	<b>Peta Strategis Deputi PSPK BSN Tahun 2020-2024 .....</b>	<b>38</b>





# **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Direktorat PPSPK (Renstra PPSPK) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra PPSPK disusun mengacu pada Renstra Kedepuyan bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, yang juga Renstra BSN Tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat PPSPK juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

## 1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian merupakan unit kerja di bawah Kedepuyan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kebijakan internasional di bidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, fasilitasi pelaku usaha dan fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur organisasi Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, serta penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang diseminasi dan konsultasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian; dan
- b. Seksi Partisipasi Masyarakat.

Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelaku usaha dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitasi Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Industri dan Organisasi Publik; dan
- b. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil.

Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Laboratorium; dan
- b. Seksi Fasilitasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Dalam rangka mewujudkan debirokratisasi, BSN melakukan transformasi jabatan struktural eselon III dan eselon IV menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Maka dilakukan perubahan nomenklatur jabatan dari semula kepala subdirektorat menjadi koordinator kelompok substansi dan kepala seksi menjadi

subkoordinator kelompok substansi. Sehingga struktur Direktorat PPSPK berubah menjadi jabatan sebagai berikut:

1. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas Pelaku Usaha

**Terdiri atas:**

- Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Usaha Mikro Kecil
- Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Industri Dan Organisasi Publik

2. Koordinator Kelompok Substansi Diseminasi SPK

**Terdiri atas:**

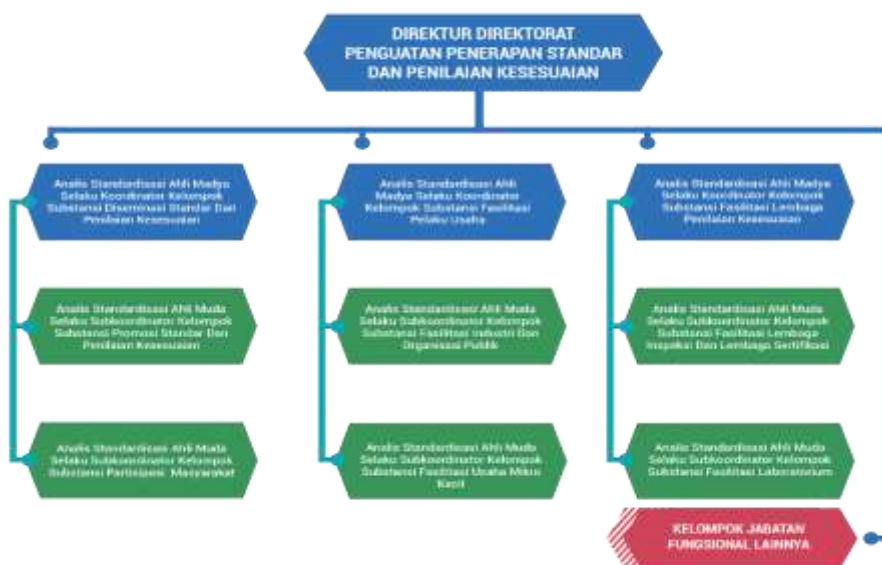
- Subkoordinator Kelompok Substansi Promosi SPK
- Subkoordinator Kelompok Substansi Partisipasi Masyarakat

3. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitas LPK

**Terdiri atas:**

- Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Lembaga Inspeksi Dan Lembaga Sertifikasi
- Subkoordinator Kelompok Substansi Fasilitas Laboratorium

Struktur Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat PPSPK

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel 1.1 Personel ASN Direktorat PPSPK**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Direktur PPSPK	-	-	1	1
2.	Koordinator Fasilitas Pelaku Usaha	-	1	-	1
3.	Koordinator Diseminasi SPK	-	-	1	1
4.	Koordinator Fasilitas LPK	-	-	1	1
5.	Sub Koordinator Usaha Mikro Kecil	-	1	-	1
6.	Sub Koordinator Industri dan Organisasi Publik	-	-	1	1
7.	Sub Koordinator Promosi SPK	-	1	-	1
8.	Sub Koordinator Partisipasi Masyarakat	-	1	-	1
9.	Sub Koordinator Fasilitas Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	-	1	-	1
10.	Sub Koordinator Fasilitas Laboratorium	-	1	-	1
11.	Staf	2	24	2	9
	Jumlah	2	30	6	38

## 1.2. Capaian Kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2015-2019

Keberadaan Direktorat PPSPK tidak bisa dilepaskan dari struktur organisasi BSN sebelumnya, yang merupakan pengembangan dari Pusat Sistem Penerapan Standar dan Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan. Maka dari itu tujuan dan sasaran kinerja Direktorat PPSPK Tahun 2015-2019 mengacu pada tujuan dan sasaran dari unit kerja sebelumnya (Tabel 1.2).

**Tabel 1.2 Tujuan Direktorat PPSPK Tahun 2015-2019 mengacu pada Tujuan Unit Kerja sebelumnya**

<b>TUJUAN</b>	
<b>Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan</b>	<b>Pusat Sistem Penerapan Standar</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian</b></li> <li>• <b>Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain kesesuaian</b></li> <li>• Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan</li> <li>• <b>Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian</b></li> <li>• <b>Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten</b></li> <li>• Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI</li> </ul>

Dapat dirumuskan dari kedua unit kerja tersebut, Tujuan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Panilaian Kesesuaian adalah:

1. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian,
2. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain kesesuaian,
3. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian, dan
4. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten.

Dapat dirumuskan sasaran Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha/organisasi
3. Meningkatkan kemampuan LPK dalam mendukung penerapan
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

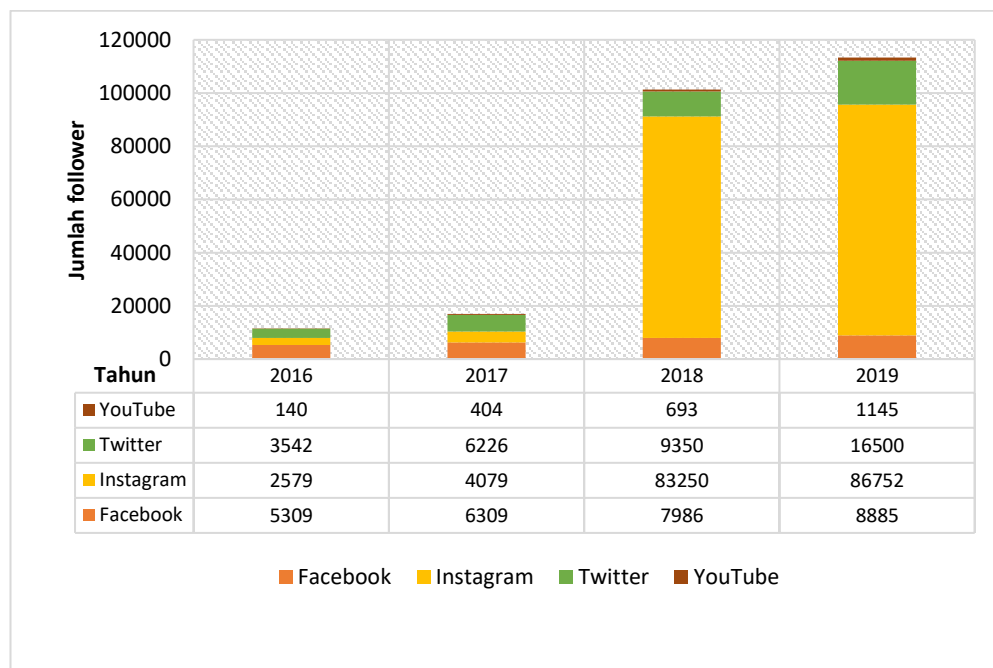
Dari sasaran tersebut dapat kinerja Direktorat dapat dikelompokkan dalam 3 capaian, yaitu di bidang a). Diseminasi standar dan penilaian kesesuaian, b). Fasilitasi pelaku usaha, dan c). Fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian.

### a). Diseminasi Standar dan Penilaian Kesesuaian

Diseminasi SPK adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi terkait dengan SPK sehingga timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan dan menerapkan standar. Kegiatan Diseminasi meliputi promosi standar dan penilaian kesesuaian; dan partisipasi masyarakat.

#### Promosi melalui media sosial

Perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah promosi SPK baik dari sisi jumlah target maupun luasan wilayah promosi. Promosi melalui media sosial dikemas dalam bentuk infografik mengenai SNI, skema penilaian kesesuaian, penerapan SNI, perundingan FTA, regulasi teknis negara lain, dan info lainnya. Terjadi peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap SNI dan penilaian kesesuaian yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah *follower* media sosial yang dikelola BSN pada akhir 2019, yaitu Youtube (1.145 pengikut), Facebook (8.885 pengikut), Twitter (16.500 pengikut) dan Instagram (86.752). Pertumbuhan *Follower* Media Sosial BSN periode 2016-2019 pada Gambar 1.2. Peningkatan jumlah *follower* sejak 4 tahun terakhir, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan antusiasme stakeholder untuk mengetahui lebih jauh tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian.



**Gambar 1.2 Pertumbuhan *Follower* Media Sosial BSN**

## **Bulan Mutu Nasional (BMN)**

Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional, merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden ke 2 Republik Indonesia, pada pidato pembukaan Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tanggal 5-7 November tahun 1991, yang pada saat diselenggarakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN), agar bulan November setiap tahun dijadikan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional.

BMN merupakan ajang diseminasi, sosialisasi, *sharing knowledge* dengan beragam tema dan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang didukung dan diisi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Rangkaian kegiatan BMN meliputi Seminar Nasional Standardisasi, Forum Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS) Pertemuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian, Bedah SNI, Talk Show, Workshop penerapan SNI, dan lain-lain. Penyelenggaraan BMN yang awalnya dipusatkan di Jakarta, dengan berkembangnya kebutuhan SPK di daerah, sejak tahun 2017 penyelenggaraan ke berbagai daerah. Pada tahun 2017, BMN dilaksanakan di Makasar, tahun 2018 di Surabaya dan tahun 2019 di Semarang. Penyelenggaraan BMN di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat. BMN mengundang pejabat pemerintah pusat terkait dan stakeholder lain, juga pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota. Melalui kegiatan BMN di daerah memberikan dampak bagi peningkatan pemahaman tentang SPK di daerah.



**Tabel 1.3 Gambaran ringkas pelaksanaan BMN tahun 2015 - 2019**

		TAHUN PENYELENGGARAAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
TEMA	Standar Mempercepat Transformasi Indonesia Menuju Lebih Baik	Standar Membangun Kepercayaan	Penerapan SNI Di Daerah Sebagai Roda Penggerak UMKM Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4.0	Standar dan Penilaian Kesesuaian Untuk Masyarakat Cerdas Pembangunan Berkelanjutan	
	Seminar Nasional Standardisasi: Keselamatan dan Keamanan Bangunan	Seminar Nasional Standardisasi: Manajemen Risiko	Seminar Nasional Standardisasi: Standar Membuat Kota Lebih Smart (Smart City)	Seminar Nasional Standardisasi: Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Mendukung Revolusi Industri 4.0	Seminar Nasional Standardisasi: Standar dan Penilaian Kesesuaian Untuk Masyarakat Cerdas Pembangunan Berkelanjutan	
D A F T A R  K E G I A T A N	Forum Diskusi Partisipasi Konsumen Dalam Kegiatan Standardisasi	Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAN)	Sosialisasi UU SPK dan RPP SSPKN	Workshop Pendidikan Standardisasi	Workshop SNI ISO 21001:2018 dan Pertemuan FORSTAN	
	Penganugerahan SNI Award 2015	Penganugerahan SNI Award 2016	Penganugerahan SNI Award 2017	Penganugerahan SNI Award 2018	Penganugerahan SNI Award 2019	
	Training dan Workshop Cara Ekspor ke Timur Tengah	Workshop Skema Penilaian SNI ISO/IEC 17065:2012	Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 2017	Workshop Akselerasi Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Melalui Sertifikasi ISO 45001:2018	Workshop Skema Akreditasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	
	Seminar TBT-WTO	Solisalisasi SNI ISO 31000 Manajemen Risiko untuk Sektor Publik	Sosialisasi RPP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Sosialisasi Skema Penerapan Standar	Workshop Skema Penilaian Kesesuaian SNI Sukarela (Studi Kasus: Smart City)	
	Talkshow : Kisah Sukses Manfaat Penerapan SNI dalam Meningkatkan Daya Saing Produk	Success Story Role Model UKM/ IKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI	Talkshow Success Story UMKM Penerap SNI	
	Forum Inspektorat Lembaga Ristek (FIL)	Seminar Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Berkelanjutan	Temu Kesestamaan RISTEKDIKTI	Forum SETTAMA Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Forum SETTAMA Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	
	Temu Nasional MASTAN	Training Manajemen Risiko	Temu Nasional Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)	Temu Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)	FGD - Forum Inspektorat LPNK Ristek (FGD FIL)	
	Konsultasi Publik "Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Seminar Penerapan SNI ISO/IEC 17024 untuk Daya Saing SDM	Workshop Akreditasi Sertifikasi SNI ISO 14001:2015 Tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML)	Knowledge Sharing dan Diskusi "Peran Standardisasi dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Bangsa Melalui Pendidikan dan Bisnis"	Publik Hearing Draft PBSN "Tata Cara Pemberlakuan Regulasi Teknis Berbasis SPK"	
	Pertemuan dan Diskusi Standardisasi dengan Pemda dan Perguruan Tinggi	Tokoh Standardisasi 2016	Workshop Perumusan SNI Untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Temu Mitra Kerja Sama Standardisasi Se-Indonesia	Penyerahan Sertifikat dan Temu Nasional LPK	
	Bedah Buku Pengantar Standardisasi Edisi Ke-2	Bedah Standar ISO 370001 Tahun 2016	Seminar Pencegahan Korupsi Berbasis SNI ISO 37001	Sarasehan Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Workshop Industri Plastik antara Kebutuhan dan Tantangan	
	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi	Workshop Pemahaman SNI ISO 15189:2012	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS)	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS) 2018	Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi 2019	
	Seminar Dukungan Standar & Penilaian Kesesuaian dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan	Workshop Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008		Workshop Pengembangan SNI: "Penguatan Standardisasi Kopi dan Produk Olahannya untuk Peningkatan Daya Saing Produk"	Sarasehan Penerapan SNI Peralatan Kesehatan	
	Temu Komite Teknis Standardisasi	Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2016		Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Seminar dan Workshop Metrologi	
				Workshop Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) dalam Perspektif Hukum	Workshop Fasilitas LPK	
				Pertemuan Teknis Laboratorium	Literasi Informasi SPK dan Temu Pengelola SNI Corner	
				Forum Pengelola SNI Corner		



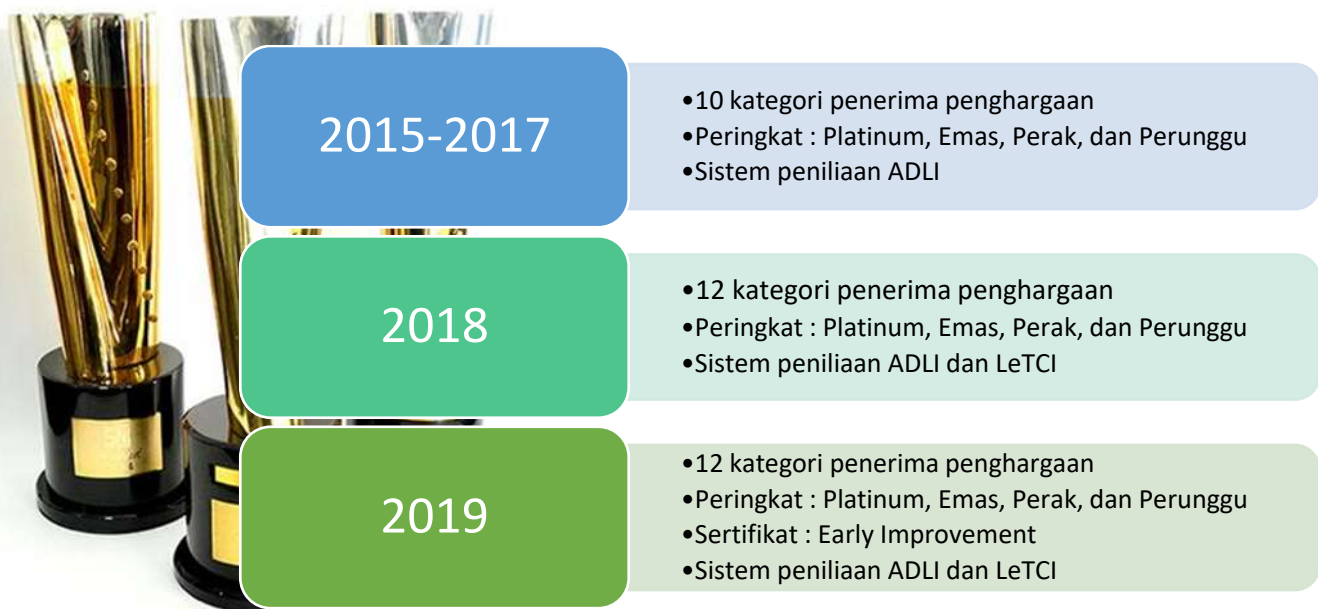
**Gambar 1. 3 Kegiatan Bulan Mutu Nasional di daerah**

### **SNI Award**

Salah satu upaya mendiseminasikan SPK adalah dengan penyelenggaraan SNI Award. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada organisasi penerap SNI yang secara konsisten menerapkan standar dengan baik dan memberikan dampak pada kinerja secara berkelanjutan. Penghargaan SNI Award didasarkan pada hasil evaluasi baik *desk evaluasi* maupun *site evaluasi* yang dilakukan oleh Evaluator dan penilaian Dewan Juri. Terdapat 7 (tujuh) aspek penting dalam kriteria SNI Award yang dinilai yaitu (1) kepemimpinan, (2) perencanaan strategis, (3) fokus pelanggan, (4) pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan, (5) manajemen sumberdaya; (6) operasional, dan (7) hasil bisnis (finansial dan non finansial).

Penghargaan SNI Award sudah diselenggarakan sejak tahun 2005. Selama kurun waktu 2005-2019 telah dilakukan transformasi berdasarkan masukan pada pihak dan perkembangan kebutuhan. Tahun 2019 merupakan tonggak baru memperkuat posisi dengan *tagline* SNI Award sebagai “*The National Quality Award of Indonesia*”, dengan harapan penerima Award ini memiliki kinerja yang *excellent* dan kemampuan dalam

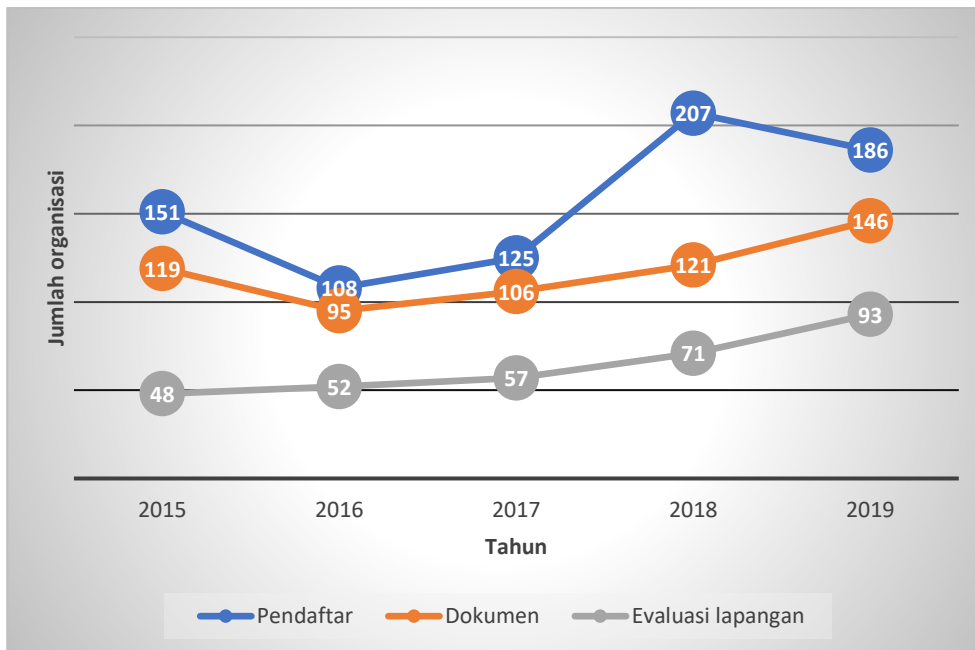
menghadapi kompetisi global dengan melakukan transformasi. Transformasi penyelenggaraan SNI Award selama kurun waktu kurun 2015-2019 tahun dalam dilihat pada Gambar 1.4.



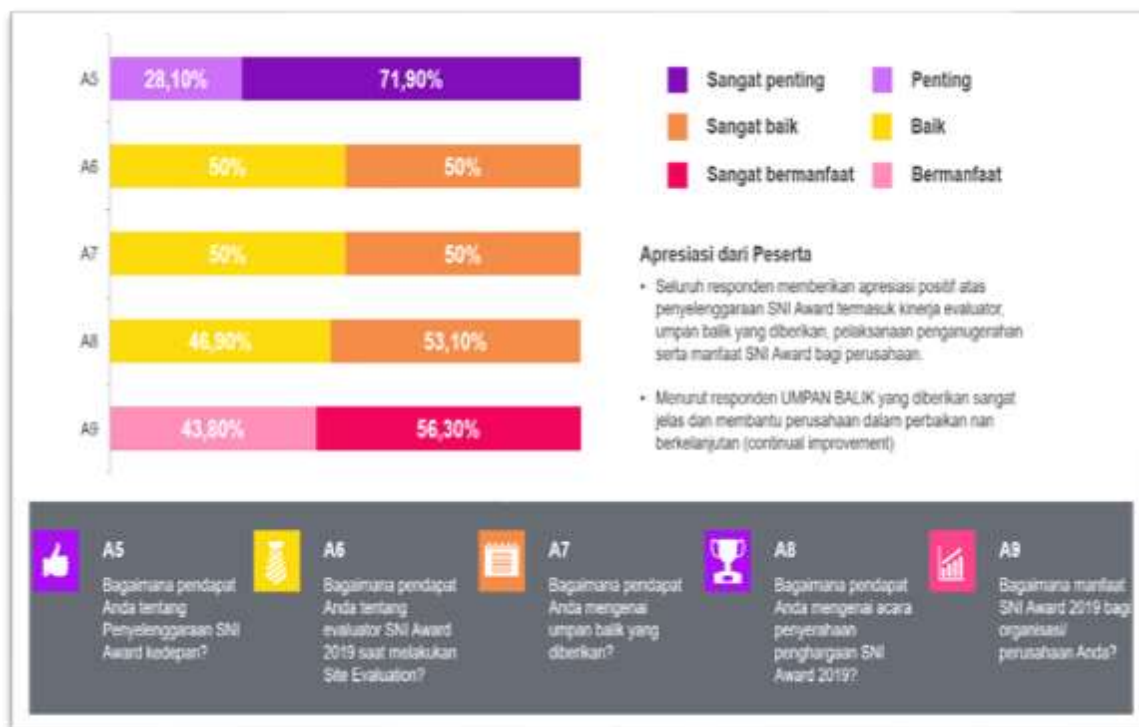
**Gambar 1.4 Transformasi SNI Award**

Selama 2015-2019, SNI Award telah diikuti sebanyak 777 organisasi, baik pelaku usaha (skala kecil, skala menengah, dan skala besar), BUMN, lembaga pendidikan dan organisasi pemerintah. Gambaran perkembangan peserta SNI Award tahun 2015-2019 sebagaimana ditunjukkan Gambr 1.5. Pendaftar SNI Award dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan jumlah pendaftar, namun peserta yang memperoleh penghargaan selalu meningkat, hal ini dapat mengindikasikan kualitas peserta semakin meningkat.

Tanggapan peserta terhadap pelaksanaan SNI Award sangat positif dan tidak ada yang memberikan tanggapan negatif dari indikator yang ditanyakan. Dari indikator tersebut terkait dengan pelaksanaan, evaluator yang ditugaskan, umpan balik yang diberikan, acara penganugerahan, dan manfaat yang diperoleh dari mengikuti SNI Award (lihat Gambar 1.6).



Gambar 1.5 Perkembangan Peserta SNI Award Periode 2015-2019



Gambar 1.6 Umpan Balik Peserta SNI Award



**Gambar 1.7 Penganugerahan SNI Award**

### **Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan SNI**

Pasal 52 UU No. 20 tahun 2014 menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam konteks penerapan standar, peran serta masyarakat diwujudkan dalam membangun budaya standar. Dalam membangun budaya standar diperlukan juga peran serta pemangku kepentingan SPK yang terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.

Strategi membangun budaya standar disamping meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan akan pentingnya SNI tetapi juga mendorong secara aktif berperan sesuai kompetensinya masing-masing dalam menerapkan SNI. Selama tahun 2015-2019, beberapa kegiatan terkait digambarkan sebagai berikut:

- Dalam penerapan SNI ISO 37001, sesuai Inpres No. 10 tahun 2016, dilakukan kolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya penerapan SNI ini dilakukan secara masif sehingga sampai akhir 2019 telah ada 96 organisasi yang telah mendapatkan sertifikasi. Dengan

semakin meningkatkan dukungan seperti Kementerian BUMN, perkembangan penerapan standar ini akan semakin meningkat.



**Gambar 1.8 Dokumentasi dukungan penerapan SNI ISO 37001 oleh KSP dan KPK**

- Dengan kemeterian lain, bersama BNPB menyelenggarakan Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) di 584 desa/kelurahan sepanjang Pantai Selatan Pulau Jawa yang diselenggarakan tanggal 12 Juli – 17 Agustus 2019, bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan SNI 8357:2017. Setiap desa yang dilewati dilakukan penilaian kematangan dalam penerapan SNI tersebut, lalu masyarakat diberikan awareness tentang SNI dan pentingnya SNI bagi mereka.



**Gambar 1.9 Sosialisasi Desa Tangguh Bencana**

- Membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah (Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Riau, Kabupaten Madiun, Kota Semarang, Kabupaten Serang, Kota Kupang, Kota Makassar). Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan *good governance*, Direktorat PPSPK melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam upaya peningkatan daya saing produk unggulan daerah, bekerjasama dengan OPD terkait, dilakukan pembinaan penerapan SNI kepada Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Dengan kalangan industri, telah dilakukan kerja bersama dengan KADIN dalam penerapan SNI terutama bagi UMKM. Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (APKABEL) dan *International Copper Association Southeast Asia* (ICA) bekerjasama dalam sosialisasi SNI Kelistrikan bidang perumahan untuk menciptakan perumahan masyarakat yang aman dan laik huni. Kolaborasi dengan Pelaku Usaha (PT. Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik) dalam pembinaan Usaha mikro kecil di wilayah sekitar perusahaan. Dengan Yayasan Danamon Peduli bersama melakukan pembinaan SNI Pasar Rakyat.
- Dalam bidang penilaian kesesuaian, melakukan kolaborasi dengan LS Sucofindo ICS, LS TUV NORD, LS IAPMO, BBIA, BBKB, BIPA, LSPro Qualis, dalam sosialisasi penerapan SNI, sosialisasi SNI Award, serta edukasi SNI kepada masyarakat.

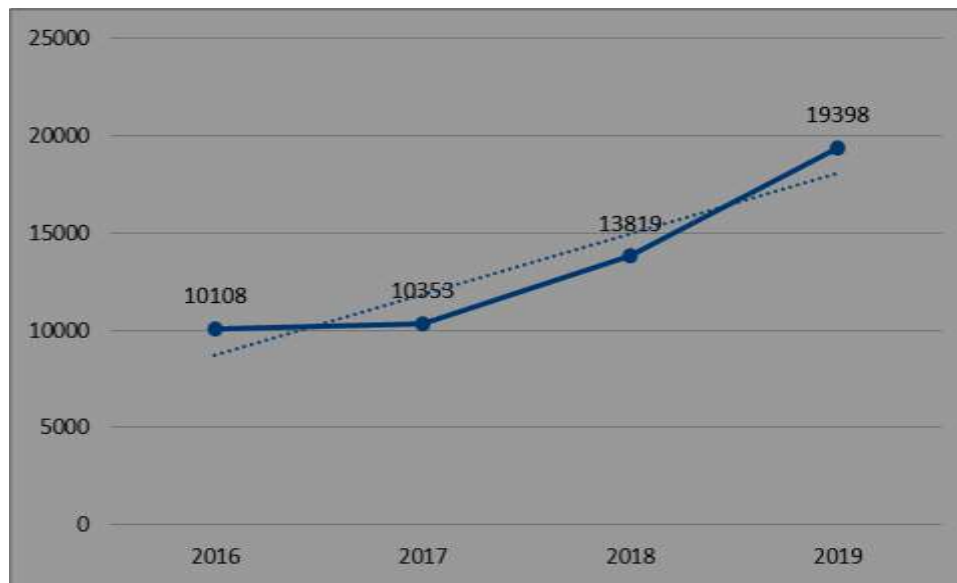
#### **b). Fasilitas Pelaku Usaha**

Tujuan ditetapkannya SNI yang utama adalah SNI dapat diterapkan sehingga memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Sampai dengan akhir 2019, jumlah organisasi yang telah menerapkan SNI sebanyak 19.398 organisasi berdasarkan data dari organisasi yang terdaftar menjadi klien lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN. Berdasarkan Tabel 1.4 dibawah ini, terlihat bahwa penerap SNI secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan jumlah SNI yang diterapkan, mengalami tren peningkatan dalam periode tahun 2016-2019.

**Tabel 1.4 Jumlah organisasi penerap SNI sesuai dengan skema akreditasi KAN**

No	Organisasi/pelaku usaha	2016	2017	2018	2019
1	Penerap SNI Produk	2982	3082	1560	2221
2	Penerap standar pertanian organic	355	319	288	316
3	Penerap standar jaminan produk halal	-	-	3314	3270
4	Penerap standar sistem manajemen lingkungan (SNI ISO 14001)	438	775	650	1944
5	Penerap pengelolaan hutan produksi lestari	-	-	223	251
6	Penerap standar ecolabel	7	7	9	8
7	Penerap standar Gas Rumah Kaca	-	-	5	5
8	Penerap standar system manajemen energi	-	-	6	57
9	Penerap standar verifikasi Legalitasi Kayu	-	-	2257	2941
10	Penerap standar system manajemen mutu (SNI ISO 9001)	5990	5691	4961	5714
11	Penerap system manajemen keamanan pangan (SNI ISO 22001)	196	198	198	380
12	Penerap system Hazzard Analytical Critical Control Point (HACCP)	91	157	171	225
13	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001)	39	113	88	163
14	Penerap Sistem Manajemen Alat Kesehatan	10	11	17	33
15	Penerap Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SNI ISO 37001)	-	-	72	96
16	Penerap Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasokan (SNI ISO 28001)	-	-	-	2
17	Penerap standar Usaha Pariwisata	-	-	-	1801
18	Penerap Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium	-	-	-	1
19	Penerap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	71
	<b>TOTAL</b>	<b>10.108</b>	<b>10.353</b>	<b>13.819</b>	<b>19.398</b>

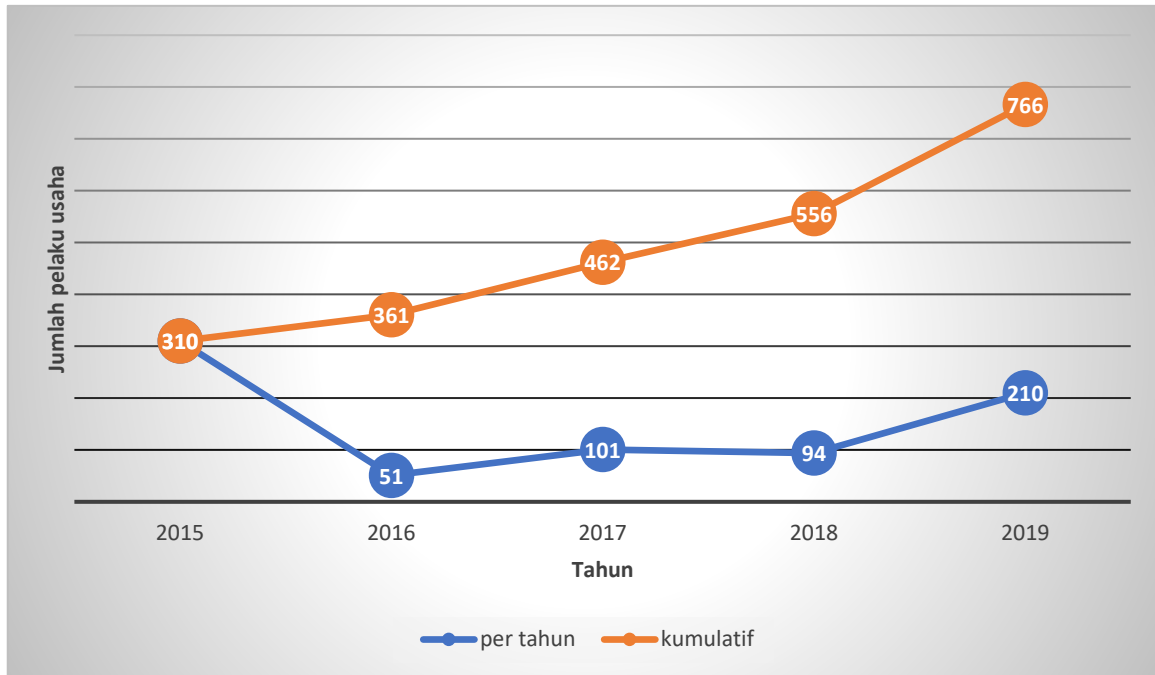




**Gambar 1.10 Pertumbuhan jumlah organisasi penerap SNI dari tahun 2016-2019**

Upaya untuk meningkatkan penerapan SNI bagi pelaku usaha (UMKM, industri, dan organisasi), Direktorat PPSPK melakukan fasilitasi sehingga mutu dan daya saing produk pelaku usaha dapat meningkat. Fasilitasi tersebut dilakukan dengan pembinaan, dimana sesuai Pasal 53 UU No. 20 tahun 2014, pembinaan tersebut dapat melibatkan kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah.

Pembinaan penerapan SNI merupakan proses yang berkesinambungan. Pembinaan tersebut berhenti sampai sertifikasi selesai namun juga promosi produk yang sudah ber-SNI ataupun mempromosikan organisasi yang sudah dapat SNI. Gambar 1.11 menunjukkan perkembangan jumlah pelaku usaha yang difasilitasi oleh Direktorat PPSPK selama tahun 2015-2019.



**Gambar 1.11 Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam penerapan SNI dalam tahun 2015-2019**

### **Pembinaan kepada UMKM**

Tahapan pembinaan dimulai dari kegiatan *awareness*, persetujuan dan komitmen pelaku usaha, pemahaman SNI sistem manajemen dan SNI produk, *gap analysis*, pengembangan sistem, implementasi hingga perbaikan berkelanjutan. Diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pelaku usaha dalam menjalankan sistem produksi yang lebih tertata, efisiensi penggunaan sumberdaya, penurunan *reject*/kesalahan/kegagalan, dan terbangun budaya kerja lebih baik dan disiplin.

Hingga Desember 2019, Direktorat PPSPK telah melakukan pembinaan pada 707 UMKM meliputi 452 UMKM sektor pangan dan 255 UMKM non pangan yang tersebar di 28 provinsi. Dari UMKM yang diberikan pembinaan tersebut, 98 UMKM diantaranya telah memperoleh sertifikasi SNI. Beberapa UMKM tersebut telah mampu memperluas akses pasarnya secara nasional, antara lain di supermarket, retail, *e-catalog*, dan *marketplace* bahkan beberapa UKM telah memenuhi persyaratan pasar ekspor antara lain ke Prancis, Amerika Serikat, Australia, Saudi Arabia, Timur Tengah, Korea Selatan, Singapura, dan Timor Leste.

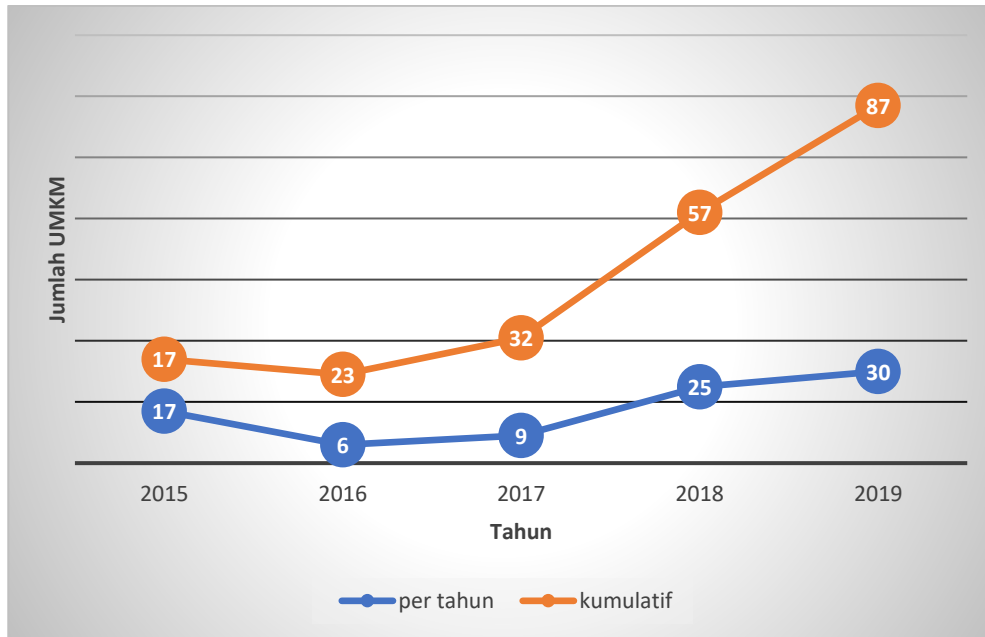


**Gambar 1.12 Data komulatif UMKM yang dbina dalam penerapan SNI tahun 2015-2019**

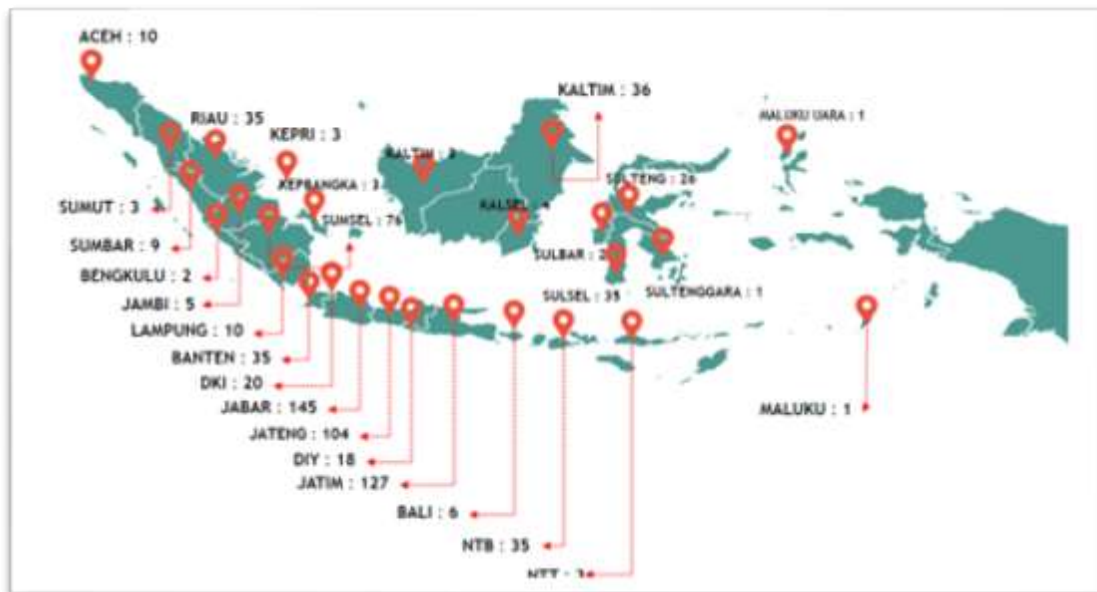


**Gambar 1.13 Pembinaan Penerapan SNI pada UMKM**

Berdasarkan Gambar 1.14 tersebut secara umum jumlah UMKM yang dibina dan mendapatkan sertifikat SNI memiliki tren yang naik. Pembinaan UMKM dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, PT Sucofindo, dan BUMN melalui program CSR.



Gambar 1.14 Akumulasi Jumlah UMKM yang dibina dan memperoleh SNI tahun 2015-2019

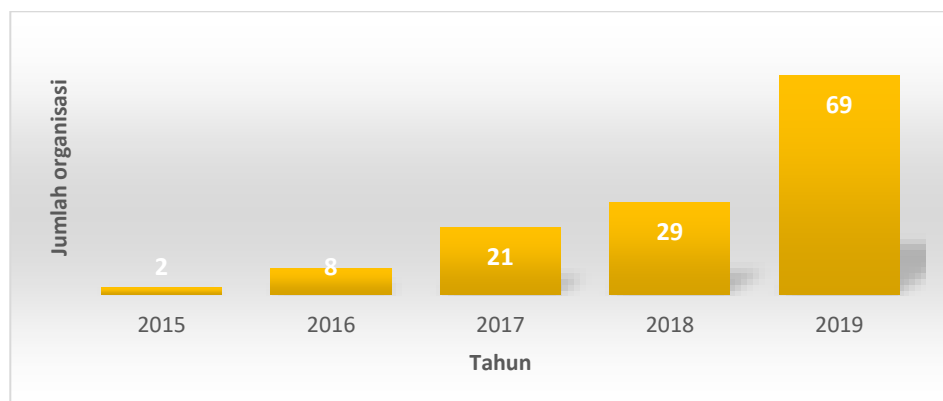


Gambar 1.15 Sebaran Pembinaan Penerapan SNI kepada UMKM di 28 Propinsi

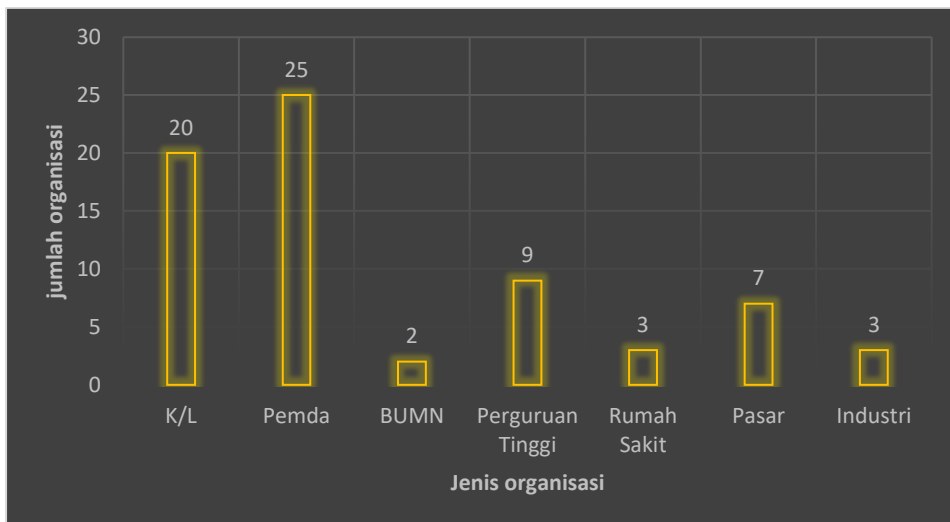
## Pembinaan kepada organisasi

Pembinaan kepada organisasi ditujukan untuk pendampingan penerapan SNI yang memberikan dampak luas pada masyarakat. Sebagian besar dilakukan pada organisasi yang memberikan layanan pada masyarakat, seperti K/L, pemerintah daerah, Rumah sakit, perguruan tinggi, BUMN dan pasar rakyat.

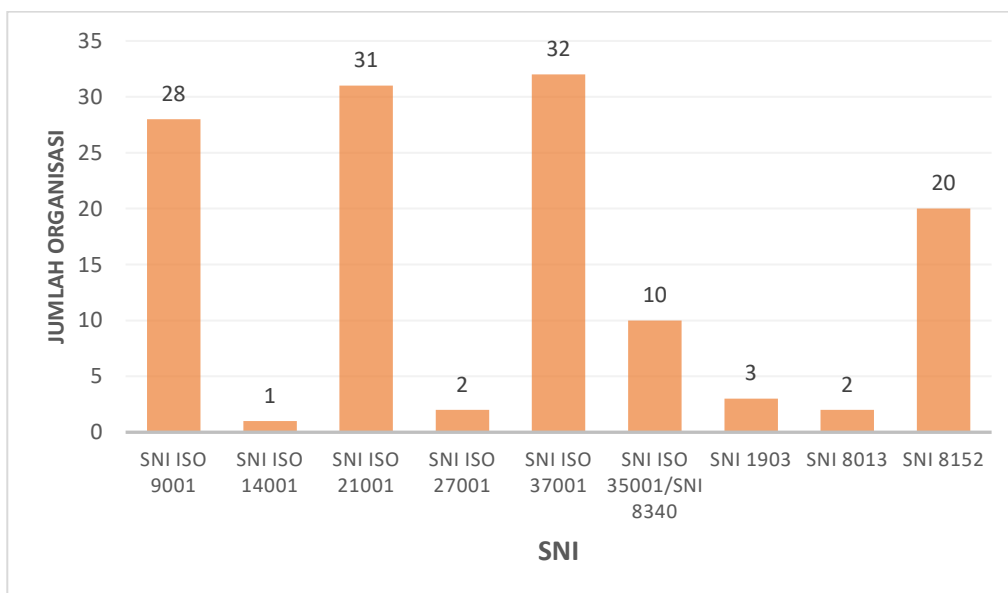
- SNI ISO 9001, Sistem manajemen mutu
- SNI ISO 14001, Sistem manajemen lingkungan
- SNI ISO 21001, Sistem manajemen organisasi pendidikan
- SNI ISO 27001, Sistem manajemen keamanan informasi
- SNI ISO 37001, Sistem manajemen anti penyuapan
- SNI ISO 35001/SNI 8340, Sistem manajemen biorisiko laboratorium
- SNI 1903, Standard Indonesian Rubber
- SNI 8013, Pengelolaan pariwisata alam
- SNI 8152, Pasar rakyat



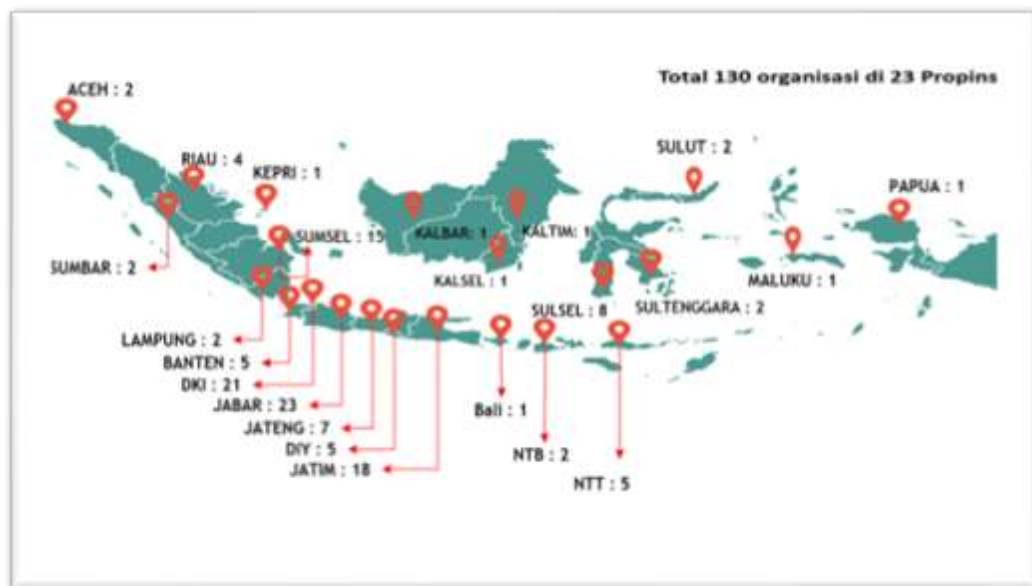
**Gambar 1.16 Jumlah Organisasi yang Dibina Dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2019**



**Gambar 1.17 Pembimbingan Organisasi berdasar Jenis Organisasi**



**Gambar 1.18 Pembimbingan Organisasi berdasar Jenis SNI**



**Gambar 1.19 Sebaran Pembinaan Organisasi yang dibina dalam Penerapan SNI Tahun 2015-2020**

Dibandingkan dengan kebutuhan penerapan SNI pada pelaku usaha baik UMKM maupun organisasi, jumlah pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PPSPK masih sangat sedikit. Maka dari itu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menciptakan *role model* penerap SNI. Harapannya *role model* ini dapat menjadi contoh untuk dapat ditiru oleh pelaku usaha yang lain.

Strategi lain yang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan stakeholder, terutama dengan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan asosiasi. Beberapa Kolaborasi Pendampingan Penerapan SNI, antara lain:

- Pembinaan Penerapan SNI 8152:2015 - Pasar rakyat. Bekerja sama dengan stakeholder (Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, dan Yayasan Danamon Peduli) melakukan pendampingan penerapan SNI 8152:2015 untuk 96 pasar rakyat di beberapa wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat.
- Pembinaan penerapan SNI ISO 37001:2016 – Sistem manajemen anti penyuapan. BSN bersama dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, melakukan edukasi kepada organisasi dan industri dan *pilot project* penerapan SNI ISO 37001. Pilot Project diselenggarakan pada Badan Karantina, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Inspektorat Kabupaten Serang, Dinas

Kesehatan Provinsi Palembang dan PT. Harimukti Teknik (pelaku usaha). Hingga akhir tahun 2019, sebanyak 96 organisasi/perusahaan telah menerapkan SNI ISO 37001 dan telah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap yang terakreditasi KAN.

- Penerapan SNI 8357:2017 Desa Tangguh Bencana. Bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan *awareness*, penilaian awal dan gap analisis penerapan SNI 8357:2017 pada 584 desa/kelurahan pada 24 Kabupaten/Kota di 5 Propinsi di pesisir Jawa dalam kegiatan Ekspedisi Destana Tsunami yang diselenggarakan BNPB. Penerapan SNI ini sangat penting karena memberi acuan kepada desa/kelurahan bagaimana melaksanakan mitigasi bencana termasuk kemungkinan dampak tsunami.
- Penerapan SNI 8013:2014 Pengelolaan Pariwisata Alam. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 telah melakukan penyusunan, sosialisasi dan uji coba perangkat verifikasi penilaian penerapan SNI 8013:2014 kepada pengelola kawasan konservasi yang memiliki lokasi wisata alam.
- Penerapan SNI 8340:2016 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium. Bekerjasama dengan IndoHUN melakukan inisiasi Penerapan SNI 8340:2016 di laboratorium Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Penerapan SNI 8340:2016 sangat penting diterapkan di laboratorium yang menangani dan/atau menggunakan bahan biologis berbahaya dengan tingkat risiko tinggi (*biosafety* dan *biosecurity*) sehingga dampak biorisiko yang ditimbulkan dalam diminimalkan.
- Penerapan SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan. Pada Tahun 2019, BSN menetapkan SNI ISO 21001:2018. Direktorat PPSPK telah melakukan pendampingan penerapan SNI ISO 21001:2018 kepada institusi pendidikan seperti Universitas Syiah Kuala NAD dan Universitas Islam Batik Surakarta.

### **Kantor layanan Teknis (KLT) BSN**

Untuk meningkatkan layanan SPK di daerah, BSN mendirikan Kantor Layanan Teknis (KLT) di Palembang, Makassar, Pekanbaru, Surabaya dan Bekasi/Bandung.

- Makassar, Sulawesi Selatan diresmikan 13 April 2017
- Palembang, Sumatera Selatan diresmikan 23 Mei 2017
- Pekanbaru, Riau diresmikan 22 April 2019
- Bekasi, Jawa Barat diresmikan 26 Februari 2019
- Surabaya, Jawa Timur diresmikan 15 Juli 2019



Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, kelima KLT telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam melakukan layanan SPK. Secara ringkas sebagai berikut:

- Pembinaan pada 132 UMKM, dan 26 UMKM diantaranya telah memperoleh sertifikasi SNI.
- Pendampingan penerapan SNI PK pada 124 LPK untuk memperluas ruang lingkup akreditasinya dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah mendukung ekspor produk unggulan daerah dan perlindungan masyarakat terhadap aspek K3L.
- Memberikan layanan SPK kepada 6.285 stakeholder baik dari kalangan regulator, pelaku usaha dan akademisi.
- Sinergi pengkayaan SPK dengan perguruan tinggi, antara lain memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk magang dan terlibat dalam kegiatan pembinaan penerapan SNI pada UMKM. Tercatat sebanyak 24 mahasiswa melaksanakan magang di KLT.
- Pelaksanaan TOT untuk Pembina SPK di daerah. Kini telah disiapkan 105 orang pembina SPK yang tersebar di KLT Jawa Barat (49 pembina), KLT Sumatera Selatan (29 pembina), dan KLT Riau sebanyak 27 pembina SPK.



**Gambar 1.20 Peresmian KLT di Palembang, Makassar, Pekanbaru, Surabaya dan Bekasi/Bandung<sup>1</sup>**

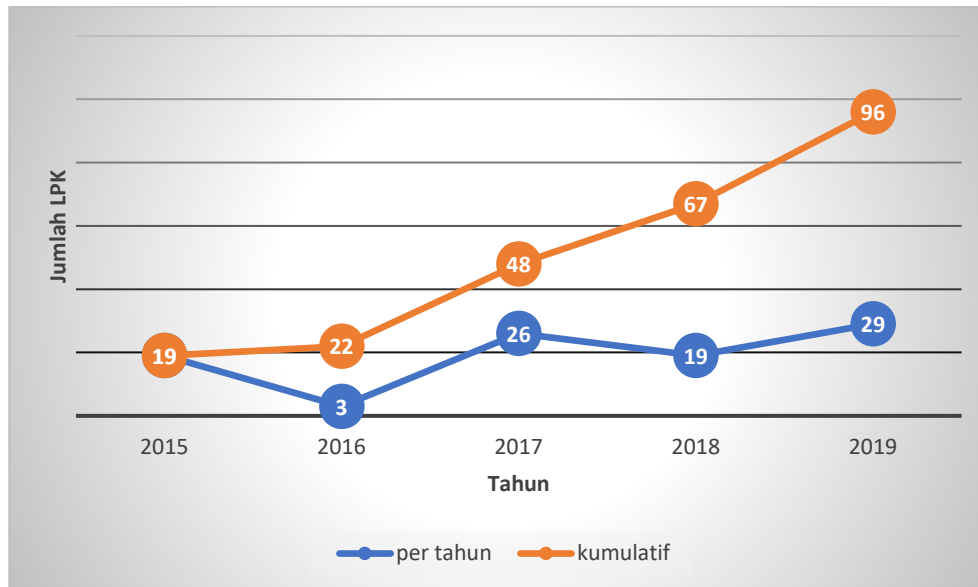
---

1





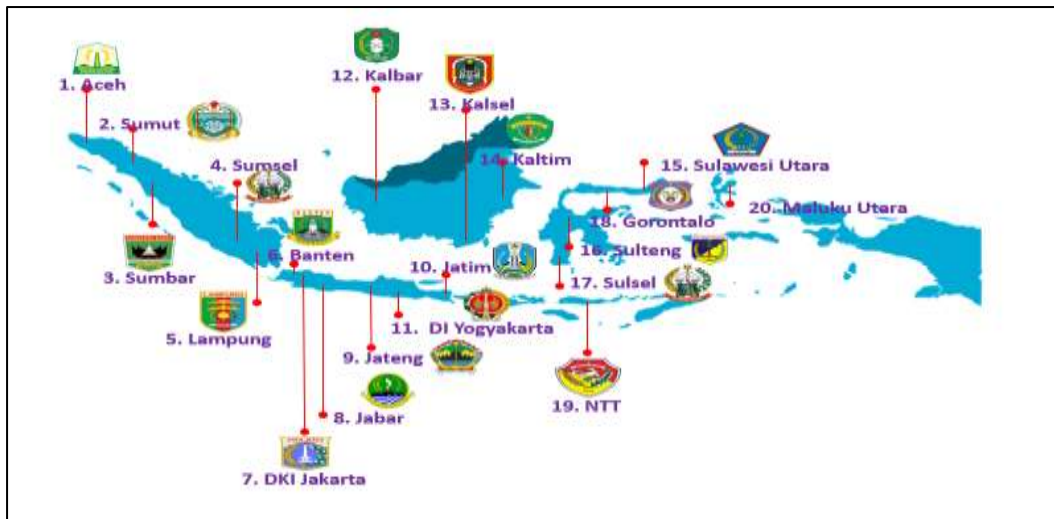
Dalam 5 tahun terakhir, program pembinaan LPK telah dilakukan pada 96 LPK (lihat Gambar 1.24). Pertimbangan penting pembinaan LPK, disamping untuk meningkatkan ketersediaan LPK berdasarkan pemetaan LPK juga memperkuat dukungan kebutuhan LPK untuk fasilitasi pelaku usaha terutama UMKM.



Gambar 1.24 Jumlah LPK yang difasilitasi BSN Tahun 2015-2019



Gambar 1.24 Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPK



Gambar 1.256 Sebaran Wilayah LPK yang di fasilitasi BSN Tahun 2015-2019

No.	Provinsi	Jenis Fasilitas	Skema Fasilitas
1.	Aceh	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
2.	Sumatera Utara	Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17065
3.	Sumatera Barat	Lembaga Sertifikasi Produk Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17025
4.	Sumatera Selatan	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
5.	Lampung	Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17065
6.	Banten	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
7.	DKI Jakarta	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk Lembaga Sertifikasi Personel Lembaga Sertifikasi Penilai Halal Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Ibadah Umrah Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17024 SNI 99001 SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17021
8.	Jawa Barat	Laboratorium Pengujian Laboratorium Kalibrasi Lembaga Sertifikasi Produk Lembaga Sertifikasi Indogap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17021
9.	Jawa Tengah	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk Penyedia Bahan Acuan	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17043
10.	Jawa Timur	Lembaga Sertifikasi Produk Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Penilai Halal Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Ibadah Umrah	SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17025 SNI 99001 SNI ISO/IEC 17065
11.	DI Yogyakarta	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065
12.	Kalimantan Barat	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065
13.	Kalimantan Selatan	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065
14.	Kalimantan Timur	Laboratorium Medik	SNI ISO/IEC 15189
15.	Sulawesi Utara	Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17065
16.	Sulawesi Tengah	Laboratorium Pengujian Lembaga Sertifikasi Produk	SNI ISO/IEC 17025 SNI ISO/IEC 17065
17.	Sulawesi Selatan	Lembaga Sertifikasi Indogap Lembaga Sertifikasi Personel	SNI ISO/IEC 17065 SNI ISO/IEC 17024
18.	Gorontalo	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
19.	Nusa Tenggara Timur	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
20.	Maluku Utara	Laboratorium Pengujian	SNI ISO/IEC 17025
20 Provinsi		96 LPK	

Tabel 1.6 LPK yang di fasilitasi BSN Tahun 2015-2019

## Pengelolaan Sekretariat *Joint Sectoral Committee on electrical and electronic equipment (JSC EEE)*

JSC EEE merupakan sebuah Komite Sektoral Bersama terkait dengan peralatan listrik dan elektronik di tingkat ASEAN yang mengurus keberterimaan system penilaian kesesuaian. Dalam Komite ini, Direktorat PPSPK merupakan Sekretariat *Designating Body* dalam melakukan pendaftaran LPK yang diakui di ASEAN.

LPK yang telah masuk *listed* LPK di negara ASEAN, maka: (1) Hasil uji/sertifikasi LPK yang terdaftar diakui negara ASEAN; (2) Pelaku usaha Indonesia yang akan mengekspor produk ke negara anggota ASEAN, cukup diuji/disertifikasi oleh LPK Indonesia yang telah *listed* di negara anggota ASEAN, tanpa perlu diuji/disertifikasi lagi di negara tujuan. Hal ini tentu saja akan menghapuskan adanya pengujian berulang di negara ASEAN, serta memperlancar transaksi dan proses perdagangan tentunya.



**Gambar 1.26 Partisipasi pada sidang JSC-EEE ke-27**

Sampai saat ini telah melakukan memfasilitasi pendaftaran LPK yang ingin masuk dalam LPK terdaftar di ASEAN. Adapun rincian LPK Indonesia yang terdaftar di ASEAN sebagaimana Tabel 1.7 dan 1.8 berikut.

**Tabel 1.7 Laboratorium Penguji yang terdaftar ASEAN**

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Keterangan
<b>Laboratorium Penguji (Testing Laboratory)</b>				
1.	BPMB	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023		Sirkulasi draft listing
2.	B4T	12 Februari 2019 – 11 Februari 2022		
3.	PT. Sucofindo Laboratory	22 Juli 2020 – 21 Juli 2023		Sirkulasi draft listing
4.	PT. Hartono Istana Teknologi	6 Desember 2017 – 5 Desember 2020	5 Juni 2021	Sekretariat DB menginformasikan untuk perpanjangan listing (2 November 2020)
5.	PT. Qualis Indonesia	6 Desember 2017 – 5 Desember 2020	28 Maret 2021	
6.	PT. UL International Indonesia	27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2020	26 April 2021	

**Tabel 1.8 Lembaga Sertifikasi Produk yang terdaftar di ASEAN**

No.	Nama LPK	Masa Listing	Masa Grace Period	Keterangan
<b>Lembaga Sertifikasi Produk (Certification Body)</b>				
1.	PPMB	6 Maret 2019 – 5 Maret 2022		
2.	Sucofindo ICS	19 Januari 2017 – 15 Januari 2020		
3.	TUV Rheinland Indonesia	11 September 2017 – 10 September 2020	10 Maret 2021	Sekretariat DB menginformasikan untuk perpanjangan listing
4.	TUV Nord Indonesia	Pengajuan baru		Pendaftaran ke sekretariat DB
5.	PT. Qualis Indonesia	Pengajuan baru		Masa kontestasi
6.	PT. UL International Indonesia	Pengajuan baru		Masa kontestasi

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Tujuan SPK sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2014, Direktorat PPSPK berperan bagaimana SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan/diterapkan oleh *stakeholder* sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut di atas. Untuk itu, Direktorat PPSPK telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) dilakukan untuk menyusun strategi penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

#### a. Kekuatan

- Dasar hukum pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian UU No. 20 Tahun 2014, yang menjadi dasar ditetapkan PP No. 34 Tahun 2018, merupakan landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Adanya dasar hukum ini dapat memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan dan mempermudah koordinasi dengan stakeholder.
- Sampai tahun 2019, BSN telah menetapkan SNI sebanyak 12.830 SNI, dimana yang aktif 10.629 SNI diantaranya. Apabila SNI tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan daya saing produk nasional.
- Sampai akhir 2019, KAN telah mengakreditasi 1.366 laboratorium pengujian, 291 laboratorium kalibrasi, 70 laboratorium medik, 24 lembaga penyelenggara uji profesiensi, 312 lembaga sertifikasi, dan 114 lembaga inspeksi. Dari 31 skema yang



telah dioperasikan, terdapat 12 skema sertifikasi yang telah mendapatkan pengakuan melalui MRA/MLA di Forum Kerjasama Akreditasi Internasional, APAC/IAF/ILAC

b. Kelemahan,

- Ketersediaan anggaran fasilitasi pelaku usaha dan LPK masih sangat kecil. Jumlah UMKM sangat banyak, sekitar 64 juta UMKM, namun dari alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Sebagai gambaran, tahun 2019, anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk memfasilitasi 180 UMKM.
- Keterbatasan SDM Pembina penerapan SNI, baik jumlah maupun waktu yang tersedia. Saat ini terdapat 146 Pembina UMKM yang terdiri 46 pembina internal BSN dan 106 pembina eksternal. Pembina internal BSN sebanyak 17 Pembina berasal dari internal Direktorat PPSPK dan 29 Pembina dari luar Direktorat. Terutama Pembina UMKM dari luar direktorat masih terkendala dengan ketersediaan waktu, mengingat bukan tugas utama. Sedangkan Pembina eksternal sebanyak 106 pembina belum optimal dalam pelaksanaannya, mengingat keterbatasan waktu dan kompetensinya.
- Ketersediaan LPK yang terakreditasi KAN masih belum mencukupi baik dari rasio jumlah lingkup LPK yang mendukung sektor usaha maupun rasio jumlah LPK yang mendukung produk unggulan daerah. Sampai saat ini rasio ketersediaan LPK untuk mendukung sektor usaha maupun rasio jumlah LPK yang mendukung potensi produk unggulan daerah, mayoritas masih 0,7 disamping itu keberadaan LPK masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat.

c. peluang,

- Peningkatan kesadaran stakeholder akan pentingnya SNI menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk yang ber-SNI, mendorong peningkatan keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan dalam penerapan SNI dan peningkatan kebutuhan LPK. Berdasarkan survei minat menerapkan SNI pada tahun 2020 dengan responden dari Konsumen, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemerintah, menyatakan bahwa lebih dari 70% berminat menerapkan dan lebih dari 80% berminat untuk menggunakan produk ber-SNI.
- Perkembangan teknologi informasi terutama melalui media sosial dan pertemuan secara daring (*on-line*) memberikan peluang bagi peningkatan upaya penyebaran materi standardisasi kepada stakeholder dan memperkuat peran

serta masyarakat (*partnership*) dalam kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Hal ini akan sangat mendukung terwujudnya budaya standar di masyarakat.

- Adanya KLT BSN di Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar, dapat memberikan peluang untuk memperluas akses dan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Keberadaan KLT merupakan prioritas nasional yang digagas oleh BAPPENAS dan mendapat respon positif dari stakeholder di daerah.
- Analisis ekonomi mikro menunjukkan adanya kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri. Berdasarkan penelitian Pusat Riset dan Pengembangan SDM, analisis manfaat ekonomi standar pada industri kecil, menengah dan besar menunjukkan bahwa penerapan standar dapat meningkatkan keuntungan ekonomi rata-rata 5 - 10% per tahun.
- Hasil evaluasi terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject* (memberikan peningkatan hasil dari 50 - 95%), meningkatkan akses pasar retail (supermarket, *e-catalog*, dll), akses ke pasar ekspor, dan dapat mengikuti tender.

#### d. tantangan

- Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dalam penerapan SNI. Program dan kegiatan pembinaan UMKM masih banyak tersebar di beberapa Lembaga, baik pemerintah, swasta atau kelompok masyarakat. Apabila peran dari masing-masing stakeholder tersebut dapat dioptimal akan dapat memberikan hasil yang baik.
- Meskipun sudah ada tren peningkatan kesadaran dan minat masyarakat dalam pemanfaatan SNI, namun masih terus menerus secara konsisten perlu ditingkatkan.

## **BAB II**

# **VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024**

## 2.1. Visi BSN, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK) merupakan salah satu unit organisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan BSN No. 10 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Secara struktural, Direktorat PPSPK dibawah Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Visi Presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang kemudian diturunkan menjadi visi BSN yang selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, yaitu:

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Mengacu pada misi BSN sebagaimana dijabarkan diatas, maka Deputi Bidang PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, yang meliputi :

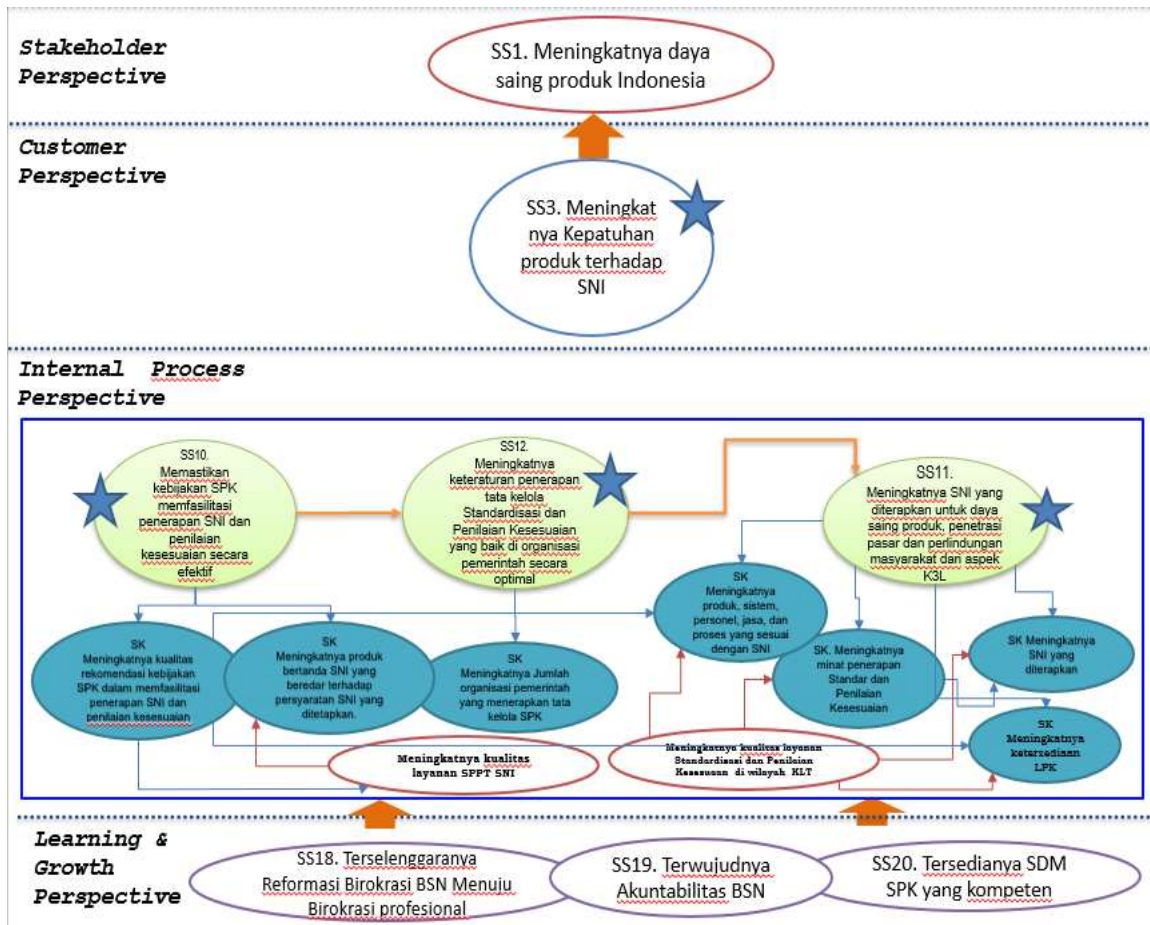
1. Mengembangkan kebijakan dan skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan internasional;
2. **Memfasilitasi peningkatan rasio ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung pengembangan potensi produk unggulan daerah dan daya saing nasional;**
3. **Meningkatkan keterlibatan organisasi dan pelaku usaha untuk penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka penguatan daya saing nasional;**
4. Menguatkan peran dan keberterimaan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian di forum nasional dan internasional;
5. Memastikan efektifitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
6. Meningkatkan tata kelola penerapan standar dan penilaian kesesuaian secara baik dan menyeluruh di organisasi pemerintah pusat dan daerah serta organisasi swasta;
7. **Meningkatkan budaya standar dan penilaian kesesuaian;**
8. **Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan budaya organisasi ke deputian.**

Untuk melaksanakan visi dan misi di atas, Deputi PSPK menetapkan tujuan utama pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh BSN adalah **Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global**. Tujuan BSN kemudian diturunkan ke tujuan Deputi PSPK sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kedeputian PSPK 2020-2024**

Tujuan	Indikator Tujuan
<b>Meningkatkan pemenuhan produk terhadap SNI</b>	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%.
<b>Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah</b>	Index Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70%

Sasaran strategis Deputi Bidang PSPK merupakan hasil cascading dari sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja 5 tahun ke depan. Penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yaitu :



Gambar 2.1 Peta Strategis Deputy PSPK BSN Tahun 2020-2024

## 2.2. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat

Dalam konteks penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, yang mengacu pada misi Deputy PSPK menjalankan misi yang difokuskan pada **Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh**, maka fokus PPSPK misi berikut:

- Memfasilitasi peningkatan rasio ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung pengembangannya potensi produk unggulan daerah dan daya saing nasional;
- Meningkatkan penerapan standar dan penilaian kesesuaian pada organisasi dan pelaku usaha dalam rangka penguatan daya saing nasional;
- Mengembangkan budaya standar dan penilaian kesesuaian
- Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
- Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Tujuan utama penerapan standar dan penilaian kesesuaian adalah meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI, yang dalam upaya penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran PPSPK**

Tujuan	Sasaran
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI</li> <li>2. Meningkatnya SNI yang diterapkan</li> <li>3. Meningkatnya minat penerapan standar dan penilaian kesesuaian</li> <li>4. Meningkatnya ketersediaan LPK</li> <li>5. Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT</li> <li>6. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran</li> </ol>

### 2.3 Nilai-Nilai Direktorat

Nilai-nilai yang dijalankan Direktorat PPSPK diturunkan dari nilai-nilai BSN dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN disingkat dengan TOP BGT, yang meliputi :

1. Trustworthy (terpercaya)
2. Oriented to Excellence (berorientasi kepada keunggulan)
3. Professional (profesional)
4. Beneficial (bermanfaat),
5. Growing (tumbuh berkembang),
6. Teamwork (kerjasama)





## **BAB III**

# **KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT**

### 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat PPSPK

Direktorat PPSPK bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Kegiatan ini terdiri atas 5 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

**Tabel 3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKSK Direktorat**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI	- Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI
	Meningkatnya SNI yang diterapkan	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK - Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan
	Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	- Presentase stakeholder yang menerapkan SNI - Presentase pelaku usaha binaan yang menjadi <i>role model</i>
	Meningkatnya ketersediaan LPK	- Rasio LPK terhadap sektor usaha - Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah
	Meningkatnya kualitas layanan standarisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan standarisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT - Persentase KLT dengan IKM minimal 3

### 3.2 Rincian Output

Rincian output kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Rencana Output**

SASARAN KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT		TARGET TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	satuan
<b><u>SASARAN KEGIATAN 1</u></b>						
<b>Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI</b>						
-	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI	10	12	15	17	%
<b><u>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat					

SASARAN KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT		TARGET TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	satuan
<b><u>RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDD.001	Bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat	10	12	15	17	kel. Masy
<b><u>SASARAN KEGIATAN 2</u></b>						
<b>Meningkatnya SNI yang diterapkan</b>						
	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	40	50	55	60	%
	Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan	15	20	25	30	%
<b><u>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM					
<b><u>RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDG.001	Bimbingan teknis kepada UMKM	150	200	250	300	UMKM
<b><u>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha					
<b><u>RINCIAN OUTPUT</u></b>						
QDH.001	Bimbingan teknis kepada badan usaha	50	60	70	80	BU
<b><u>SASARAN KEGIATAN 3</u></b>						
<b>Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>						
	Persentase stakeholder yang menerapkan SNI	40	50	55	60	%
	Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi role model	20	30	40	50	%
<b><u>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</u></b>						
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10.000	12.500	14.000	15.000	10.000
<b><u>RINCIAN OUTPUT</u></b>						

SASARAN KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT		TARGET TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	satuan
PEF.001	Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian	7.500	9.500	10.000	10.500	orang
PEF.002	Sosialisasi kepada Penerap SNI	2.500	3.000	4.000	4.500	orang
<b>SASARAN KEGIATAN 4</b>						
<b>Meningkatnya ketersediaan LPK</b>						
	Rasio LPK terhadap sektor usaha	0,73	0,74	0,75	0,76	Rasio
	Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah	0,78	0,8	0,83	0,85	Rasio
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga					
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
QDB.001	Bimbingan Teknis kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian	25	30	35	40	orang
<b>SASARAN KEGIATAN 5</b>						
<b>Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT</b>						
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan s tandardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT	3.5	4	4.2	4.5	Nilai
	Persentase KLT dengan IKM minimal 3	60	80	100	100	%
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
QAH	Pelayanan Publik Lainnya					
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
QAH.001	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	1	1	1	1	Layanan
QAH.002	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	1	1	1	1	Layanan
QAH.003	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	1	1	1	1	Layanan

SASARAN KEGIATAN/ KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT		TARGET TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	satuan
QAH.004	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	1	1	1	1	Layanan
QAH.005	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1	1	1	1	Layanan



## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

#### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati Direktur PPSPK dan Deputi PSPK untuk dilaksanakan per tahun. Target kinerja Direktorat PPSPK digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Direktorat PPSPK.

**Tabel 4.1 Target Kinerja Direktorat Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program	Satuan	Baseline	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI	1	Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI	%			10	12	15	17
2	Meningkatnya SNI yang diterapkan	2	Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK	%			40	50	55	60
		3	Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan	%			15	20	25	30
3	Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	4	Persentase stakeholder yang menerapkan SNI	%			40	50	55	60
		5	Persentase pelaku usaha binaan yang menjadi <i>role model</i>	%			20	30	40	59
4	Meningkatnya ketersediaan LPK	6	Rasio LPK terhadap sektor usaha	Rasio			0,73	0,74	0,75	0,76
		7	Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah	Rasio			0,78	0,8	0,83	0,85
5	Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT	8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan s tandardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT	Indeks			3.5	4	4.2	4.5
		9	Persentase KLT dengan IKM minimal 3	%			60	80	100	100

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup Direktorat PPSPK dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM). Prakiraan kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Direktorat PPSPK Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan



program dan kegiatan Direktorat PPSPK yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Prakiraan kebutuhan anggaran Direktorat PPSPK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1.



## **BAB V PENUTUP**

Direktorat PPSPK merupakan unit di bawah Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan kegiatan Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BSN. BSN melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”

Direktorat PPSPK dalam mendukung visi dan misi tersebut melaksanakan kegiatan dengan tujuan Meningkatkan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian. Tujuan tersebut memiliki Sasaran yaitu: 1). Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI, 2). Meningkatnya SNI yang diterapkan, 3). Meningkatnya minat penerapan standar dan penilaian kesesuaian, 4). Meningkatnya ketersediaan LPK, 5). Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT, dan 6). Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran.

Dokumen Rencana Strategis Direktorat PPSPK Tahun 2020-2024 digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Direktorat PPSPK dalam mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Deputi PSPK dan BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel Direktorat PPSPK dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat untuk dapat mempertahankan dan memperkuat penerapan standar dan penilaian kesesuaian untuk meningkatkan daya saing nasional dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

## LAMPIRAN 1

### Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>		Jakarta											
<b>Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>		Jakarta						13.500	14.000	14.200	14.200	13.500	
	<b>Meningkatnya produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang sesuai dengan SNI</b>												Dit. PPSPK
	- Persentase peningkatan produk, sistem, personel, jasa, dan proses yang ber-SNI			10	12	15	17						
	<b>Meningkatnya SNI yang diterapkan</b>												Dit. PPSPK
	- Persentase SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, organisasi dan LPK			40	50	55	60						
	- Persentase pertumbuhan SNI yang diterapkan			15	20	25	30						
	<b>Meningkatnya minat penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian</b>												Dit. PPSPK
	- Presentase stakeholder yang menerapkan SNI			40	50	55	60						
	- Presentase pelaku usaha binaan yang menjadi <i>role model</i>			20	30	40	59						
	<b>Meningkatnya ketersediaan LPK</b>												Dit. PPSPK
	- Rasio LPK terhadap sektor usaha			0,73	0,74	0,75	0,76						
	- Rasio LPK terhadap produk unggulan daerah			0,78	0,8	0,83	0,85						
	<b>Meningkatnya kualitas layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT</b>												Dit. PPSPK
	- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di wilayah KLT			3.5	4	4.2	4.5						
	- Persentase KLT dengan IKM minimal 3			60	80	100	100						



## LAMPIRAN 2

### MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian







Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  
Badan Standardisasi Nasional (BSN)  
Gedung 1 BPPT Lantai 12  
Jl. MH. Thamrin No. 8 Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340  
Telp | 021 – 3927422 ext 164 , Fax | 021 – 3927527  
Email | [ppspk@bsn.go.id](mailto:ppspk@bsn.go.id)